

KAJIAN STUDI KULTURAL DAN PEDAGOGIK DALAM PENDIDIKAN INDONESIA

Walan Yudhiani

Dosen Sosiologi Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang

Email: wulantudhiani@yahoo.com

Abstrak: Pendidikan dan kekuasaan merupakan suatu kajian studi kultural, bagaimana suatu rezim atau pemerintah melestarikan kebudayaan melalui lembaga pendidikan. Apabila suatu sistem kekuasaan memaksakan kehendaknya dan merampas kemerdekaan individu beserta kebudayaan maka pendidikan telah berubah menjadi alat *oppressive* bagi perkembangan individu atau kelompok masyarakat.

Kata Kunci: Kultural, Pedagogik, Pendidikan Indonesia

Abstrak: *Education and freedom are a cultural studies, how the regime or government conserve culture through education institution. When a regime presses its willness and takeover individual freedom and their culture that means education to be oppressive tools for individual and society group.*

Keywords : *Cultural, Pedagogic, Indonesian Education*

Pendahuluan

Awal abad ke-21 menghadirkan banyak tantangan global pada tatanan pendidikan nasional. Dr. Willy Toisuta mengatakan bahwa kekacauan manajemen pendidikan nasional dewasa ini disebabkan pemerintah yang tidak mempunyai *platform pendidikan nasional*. Hal ini bisa jadi karena minimnya kesinambungan juga evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang ada. Pejabat baru berarti kebijakan yang baru. Polemik kehadiran PP No 66 tahun 2010 menambah daftar panjang jejak mengenaskan pendidikan Indonesia. Prof. H.A.R Tilaar dalam bukunya *Manifesto Pendidikan Nasional*, beranggapan bahwa terdapat dua aliran pemikiran yang sangat dominan yang memengaruhi perkembangan pendidikan nasional, yaitu *postmodernisme* dan studi kultural (*cultural studies*).

Postmodernisme yang bersifat *open ended* menjadikannya sangat beragam dan sulit diidentifikasi. Dalam esainya tahun 1979, *The Post Modern Condition: A Report on Knowledge*, Lyotard merumuskan postmodernisme sebagai fenomena intelektual dan kultural yang secara kultur disebut metanarasi semacam narasi yang melegitimasi suatu pandangan dan tindakan.

Pendidikan di Indonesia, saat ini sedang berhadapan dengan dua permasalahan secara bersamaan, yaitu permasalahan internal dan eksternal. Secara internal Pendidikan Indonesia tengah

melakukan perombakan sistem, penataan dan restrukturisasi strategi pengembangan yang jauh lebih tepat, akurat, dan akseleratif. Sementara itu, secara eksternal, Pendidikan Indonesia terus berdampingan dan beriringan dengan perkembangan masyarakat dunia yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pendidikan Indonesia membutuhkan penyegaran dalam studi kultural dan pencarian pedagogik yang relevan dengan struktur kognisi masyarakat Indonesia.

Tulisan ini akan membahas tentang sejauh mana studi kultural melihat proses perubahan sosial dalam struktur kekuasaan yang mengatur hubungan antarmanusia, manusia dan lembaga-lembaga sosial, perubahan, dan pergeseran kebudayaan dari pusat ke kebudayaan pinggiran yang memunculkan pandangan-pandangan baru tentang kebudayaan yang berbeda dengan pandangan tradisional. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia yang selalu terbentur dengan benteng kebudayaan dan pandangan masyarakat yang multikultural mampu memosisikan pendidikan itu sendiri ditengah-tengah tradisi tanpa harus bersifat tradisional.

Studi Kultural

Di Universitas Birmingham Inggris tahun 1964 Studi kultural lahir bersamaan dengan kelahiran *Center for Contemporary Culture Studies* (CCCS). Tapi baru pada tahun 1972 lembaga ini dikenal di dunia. Perhatian terhadap studi kultural di dunia akademis dimulai ketika diadakan seminar besar di University of Illinois. Tetapi seminar itu tidak dapat menghasilkan suatu rumusan yang jelas tentang apa itu studi kultural, namun sudah menjadi suatu permulaan yang penting dalam dunia pendidikan khususnya di Amerika Serikat, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Saat ini studi kultural telah berkembang di Kanada, Perancis, India, Australia. Pada awalnya studi kultural dianggap studi yang dekat dengan ajaran-ajaran Marxisme yang tidak sesuai dengan keadaan perang dingin pada waktu itu.

Studi kultural di Amerika Serikat menolak ajaran-ajaran Marxisme yang ortodok. Oleh karena itu studi kultural mendapat tempat di kalangan akademisi untuk dikaji secara lebih dalam lagi. Di Perancis studi kultural menyimak proses asimilasi budaya Perancis dengan eks koloninya, Australia mengikuti Inggris, sedangkan di India studi kultural sudah dimulai sebelum CCCS di University of Birmingham di mulai. Hal ini sangat menguntungkan karena di dalam studi kultural itu juga dipelajari tentang teknologi dan masyarakat sedang berkembang. Jadi studi kultural tidak hanya berbicara tentang kebudayaan.

Teori Budaya Marxis dan Konsep Ideologi

Studi kultural merupakan salah satu gerakan akademis interdisipliner. Para interaksionis simbolik seperti Norman Denzin (Angger, 2006: 19) mengaduk tema pendekatan yang berlawanan

ke dalam versi teori sosial kritis yang bukan hanya berlawanan dengan positivisme, tapi juga menggabungkan agenda deskriptif tradisional dalam Sosiologi kualitatif dengan agenda teoritis sosial Jerman dan Perancis. Proyek interdisipliner ini tidak hanya berlawanan dengan positivisme dan neokonsevatisme tetapi juga dengan model pembagian kerja akademis yang tersusun berdasarkan bidang keilmuan pada model Jerman abad ke 19. Kritikan positivisme tumpang tindih dan menawarkan kritik disiplinaritas yang tujuannya untuk menciptakan kembali seluruh lapangan intelektual dan akademis dengan cara yang tidak cukup dikenal ilmuwan tradisional dalam ilmu sosial dan budaya.

Cultural studies sebagai gerakan teoritis, cultural studies sebagai model analisis dan kritik budaya teoritis yang tidak berasal dari proyek teori sosial kritis atau memberikan kontribusi adalah berbeda. Angger lebih tertarik untuk membahas masalah mode kultural studies yang memberikan kontribusi kepada penteorin sosial dan kepada kritik ideologi yang digariskan oleh Marx. Asal mula kultural studies sebagai mode teori sosial kritis adalah dari kerangka berfikir Marxis dan Neo-Marxis dalam menganalisis budaya, elit maupun populer sebagai suatu mode ideologi. Marx dan Engels (1974) mengemukakan kritik budaya dalam buku "*German Ideology*" : ide yang berkuasa adalah ide kelas yang berkuasa.

Tetapi tidak ada Marxis yang setuju dengan sentimen ideologi melindungi status Quo kapitalis, tapi teori budaya Marxis khususnya analisis Mazhab Frangfurt terhadap industri budaya, melihat kebudayaan sebagai fenomena yang lebih independen di bandingkan yang dinyatakan oleh Engel dan Marx. Budaya bukan semata-mata refleksi atau representasi sistem ekonomi namun benarbenar beroperasi secara independen dari ekonomi tersebut. Jika budaya dilihat semata-mata membicarakan nilai sistem sebagai doktrin, maka dia tidak akan "hegomonis" (mencakup secara keseluruhan sehingga menjadi independen dari ekonomi) seperti yang diungkapkan Gramsci, namun budaya memainkan peran yang lebih nyata pada kapitalisme akhir, seperti yang menjadi perdebatan Mazhab Fankfurt dalam menganalisa industri budaya.

Teoritisasi budaya Marxis bekerjadalam kerangka Marxis untuk menganalisa dan mengkritik ideologi. Mereka berpendapat bahwa sistem kepercayaan akan membantu mereproduksi sistem ekonomi dan sosial. Di sisi teoori budaya Marxis menolak pandangan bahwa ideologi semata-mata merupakan refleksi, cerminan, dan representasi ekonomi yang dimuntahkan oleh ekonomi hanya sebagai sistem simbol kepalsuan. Marx memahami ideologi sebagai sistem mistifikasi yang membingungkan, mendistorsi realitas, mempropaganda kepalsuan. Sedangkan teoribudaya Marxis berpandangan bahwa ideologi telah menjadi sistem ide, konsep dan representasi yang lebih kompleks dan tak terpatahkan, dan langsung menutup pintu untuk terjadinya perubahan sosial radikal dan membuka pintu untuk prestasi dan individu.

Teoritis budaya marxis memperlakukan budaya seperti televisi, jurnalisme, film dan iklan sebagai wilayah ekonomi dan ideologis yang melibatkan wacana, kesadaran dan konsumsi. Kapitalis memerlukan ideologi dalam menciptakan kesadaran palsu sehingga orang tidak dapat mengenali ketidakadilan sejati kapitalisme.. Mereka beranggapan bahwa masyarakat tidak dapat lagi menunda pembebasan sampai kehidupan setelah mati dan mengabaikan kepuasan duniawi. Untuk itu ideologi harus dapat menjanjikan relaksasi manusia yang tengah berada di bawah banyak tekanan yang pernah memerintah kehidupan personal dan publik mereka. Di samping itu ideologi harus memberikan kemungkinan kepada merek dalam menghadapi desublimasi

Teori budaya Marxis menggali kebudayaan sebagai wilayah ideologi lebih banyak dan lebih rumit. Ideologi, yang disediakan oleh doktrin dan wacana budaya seperti agama dan teori ekonomi tidak perlu melampaui kehidupan mereka namun dapat eksis sebagai “superstruktur” dalam buku buku besar dan kesepahaman tentang “buku yang baik” serta sumber lain kesadaran palsu.

Ideologi harus mencakup seluruh kehidupan seluruh kehidupan manusia sehari-hari, menutupi dirinya sendiri untuk mengekspresikan pesan ringan dan sublimalnya. Ideologi terikat dengan wacana budaya, praktik, representasi dan pengalaman sehingga manusia kehilangan pemisah antara yang nyata dan yang bersifat ilusi.

Studi Kultural, Suatu Disiplin?

Apakah Studi Kultural itu? Pertanyaan ini sering muncul, apalagi ketika memasuki dunia akademik seperti di universitas, karena akan timbul masalah bidang studi apakah yang akan dimasuki oleh studi kultural, padahal sebelumnya sudah ada bidang-bidang studi tradisional seperti ilmu bahasa, sosiologi dan lainnya. Pertemuan Oklahoma menyebutkan bahwa studi kultural pada tahun 1990-an akan menjadi “*crossing the disciplines*”. Hal ini berarti bahwa studi kultural akan melewati batas-batas disiplin tradisional yang dikenal di dunia universitas.

Studi kultural merupakan suatu disiplin tanpa bentuk (*ghostly discipline*). Artinya setiap kali kita berusaha untuk merumuskan setiap kali disiplin studi kultural akan bergerak melewati batasnya dengan isi yang selalu berubah (*unstable*), karena kebudayaan itu akan terus-menerus mengalami perubahan, baik bentuk, isi melalui proses dialog dan perdebatan secara terus-menerus. Oleh karena itu studi kultural bersifat antidisiplin. Studi kultural menempatkan posisinya dengan disiplin-disiplin tradisional dalam menjalani prosesnya. Oleh karena itu Studi kultural berada dalam suatu Studi kultural berada dalam “*cluster discipline*” dalam proses penghapusan, sehingga posisinya berada dalam perubahan yang terus-menerus. tidak adanya batas-batas yang tegas mengenai disiplin studi kultural menyebabkan munculnya perdebatan terus menerus yang tidak berkesudahan tentang eksistensi *daricultural studies*. Namun *cultural studies* mempunyai hak untuk tetap hidup, karena studi kultural melihat keseluruhan budaya manusia dapat dijadikan objek

penelitiannya. Setiap budaya mempunyai ciri masing-masing sesuai dengan perubahan zaman. Dan hal ini tidak dapat didekati dengan disiplin-disiplin tradisional dalam dunia akademik yang kita kenal, melainkan dengan perspektif menyeluruh dari kebudayaan yang hidup.

Cary Nelson dalam Tilaar, (2003: 11-15) mengemukakan 16 Manifesto studi kultural, yang tujuannya agar kita tidak terjebak dalam mengambil definisi atau mencari batas-batas disiplin dari studi kultural. Manifesto Studi Kultural itu adalah:

1. Studi kultural bukan semata-mata studi sastra, seperti bahasa tertentu tapi juga melihat tema analisis semiotik film, lukisan, nyanyian, novel dan lain-lain
2. Studi kultural tidak terbatas hanya pada studi apa yang disebut budaya populer (*Populer culture*), contoh studi kultural membahas bagaimana produk kebudayaan ditentukan atau dihilangkan oleh budaya yang ada
3. Mempelajari Studi kultural bukan berarti meninggalkan studi yang secara historis dikenal dengan kebudayaan tingkat tinggi (*high culture*)
4. Studi kultural bukan semata-mata studi semiotik, maksudnya bukan semata-mata mencari arti kata, tapi mencari makna dari kata yang telah diubah dan didefinisikan dalam kebudayaan, contohnya kata ibu, bapak dan lain-lain
5. Studi kultural bertujuan untuk mempelajari produk, resepsi dan penggunaan yang beragam dari teks
6. Studi kultural melihat kebudayaan di dalam relasi-relasinya
7. Studi kultural tidak mempunyai metodologi yang dapat diulang, karena setiap metodologi hanya sesuai dengan suatu bidang atau domain kebudayaan
8. Aspek historis dari suatu kegiatan kebudayaan
9. Studi kultural berkaitan dengan arti sosial dan politis dari suatu gejala kebudayaan
10. Studi kultural bukan hanya menyajikan suatu liberalisasi pemikiran dari yang mempelajarinya, tetapi juga memberikan kebebasan kepada seseorang
11. Studi kultural mempunyai tanggungjawab secara terus menerus untuk mengkaji komitmen seseorang
12. Studi kultural memberikan pembenaran terhadap pemikiran yang diterima oleh masyarakat
13. Aspek-aspek historis dalam studi kultural adalah memberikan wacana dialogi agar lahir kesadaran arti reartikulasi dari teks serta konteks yang berlaku secara praktik-praktik sosial
14. Analisis historis serta keadaan kontemporer masyarakat menyebabkan studi kultural memberikan intervensi kehidupan dewasa ini dalam rangka untuk membina masa depan yang lebih baik

15. Studi kultural memberikan perhatian kepada masa kini sebagai dasar yang nyata untuk membangun masa depan yang lebih baik

16. Studi kultural dengan scope yang telah dikemukakan di atas menuntut suatu perubahan dalam keidupan disiplin ilmu pengetahuan

Dari manifesto studi kultural di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bentuk dari *ghostly discipline* yang bernama studi kultural yaitu:

1. Studi kultural merupakan suatu bidang kajian antardisiplin, lintas disiplin mengenai budaya kontemporer
2. Studi kultural merupakan suatu kajian kritis mengenai masalah-masalah kebudayaan, masalah imperialisme, kapitalisme, kehidupan masyarakat yang terbelah
3. Studi kultural meliputi ranah pemikiran yang sangat mendominasi kehidupan bersama manusia

Dari sini dapat kita lihat apakah studi kultural memang berhak untuk menjadi suatu disiplin ilmu. John Storey (Tilaar, 2003: 16) mengatakan bahwa secara tradisi, suatu disiplin akademik mempunyai tiga kriteria yaitu:

1. Memiliki objek penelitian
2. Terdapat asumsi-asumsi dasar yang merumuskan metode pendekatan kepada objek penelitian
3. Setiap disiplin mempunyai sejarah dari disiplinnya itu sendiri

Sementara kalau kita lihat objek kajian studi kultural sangat sulit untuk dirumuskan karena kebudayaan itu sendiri merupakan suatu *entity* yang terus berubah dan bergerak. Metodologi yang dipakai tidak dapat diterapkan pada objek penelitian yang lain karena mempunyai latar belakang historis yang berbeda. Kalau kita lihat dari kesejarahan studi kultural yang boleh dikatakan sudah mencakupi, walaupun diakui sejarah dari studi kultural tersebut relatif masih sangat muda. Apalagi masing-masing negara memberikan corak yang berbeda-beda mengenai objek penelitian studi kultural.

Asumsi tentang bahwa studi kultural adalah Marxisme, bukan berarti bahwa semua praktisi studi kultural adalah orang-orang Marxis. Tetapi yang pasti studi kultural berdasarkan kepada Marxisme dalam dua hal

1. Pengertian mengenai studi kultural. Kebudayaan haruslah dianalisis dalam relasinya dengan struktur sosial serta latar belakang historis. Seperti yang diungkapkan oleh Raymond Williams, bahwa antara sejarah dan budaya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

2. studi kultural mengasumsikan bahwa masyarakat kapitalis industrial terbagi secara merata menurut etnis, gender, serta kelas masyarakat. Jadi kebudayaan tidak terlepas dari ideologi. Oleh karena itu ideologi merupakan salah satu konsep sentral dalam studi kultural. Tidak salah kalau pakar sementara ini mengatakan bahwa studi kultural bersifat politis namun bukan dalam arti pragmatis. Studi kultural dilahirkan oleh pakar-pakar Inggris yang berorientasi Marxisme. Namun demikian hubungan studi kultural dengan Marxisme bukan berarti bahwa studi kultural bukan semata-mata Marxisme industrialis.

Dalam perkembangannya studi kultural justru merupakan konsep yang menentang Marxisme. Studi kultural itu lahir akibat dua penolakan yaitu: *pertama* Studi kultural menolak elitisme dalam budaya tingkat tinggi dan tradisi besar. *Kedua* Pandangan yang reduksionis dan determinisme ekonomi dari kebudayaan

Cultural studies (kajian budaya) memfokuskan diri pada hubungan antara relasi-relasi sosial dengan makna-makna. Berbeda dengan “kritik kebudayaan” yang memandang kebudayaan sebagai bidang seni, estetika, dan nilai-nilai moral/kreatif, kajian budaya berusaha mencari penjelasan perbedaan kebudayaan dan praktek kebudayaan tidak dengan menunjuk nilai-nilai intrinsik dan abadi (*how good?*), tetapi dengan menunjuk seluruh peta relasi sosial (*in whose interest?*).

Dengan demikian setiap pemilahan antara masyarakat atau praktek yang “berkebudayaan” dan yang “tidak berkebudayaan”, yang diwarisi dari tradisi elit kritisisme kebudayaan, sekarang dipandang dalam terminologi kelas.

Bentuk kajian budaya dipengaruhi secara langsung oleh perlawanan untuk mendekolonialisasikan konsep tersebut dan untuk mengkritisi tendensi yang berusaha mempertahankan aturan-aturan yang mereproduksi kelas dan ketidaksamaan lainnya. Maka kajian budaya membangun sebuah kerangka kerja yang berusaha menempatkan dan menemukan kembali kebudayaan dari kelompok-kelompok yang sampai sekarang dilupakan. Inilah awal diperhatikannya bentuk-bentuk dan sejarah perkembangan kebudayaan kelas pekerja, serta analisis bentuk-bentuk kontemporer kebudayaan populer dan media.

Tidak seperti disiplin akademis tradisional, kajian budaya tidak mempunyai ranah intelektual atau disiplin yang terdefinisi dengan jelas. Ia tumbuh subur pada batas-batas dan pertemuan bermacam wacana yang sudah dilembagakan, terutama dalam sastra, sosiologi, dan sejarah; juga dalam linguistik, semiotik, antropologi, dan psikoanalisa. Bagian dari hasilnya, dan bagian dari pergolakan politik dan intelektual tahun 1960-an (yang ditandai dengan perkembangan yang cepat dan meluasnya strukturalisme, semiotik, marxisme, dan feminisme) kajian budaya memasuki periode perkembangan teoritis yang intensif. Tujuannya adalah untuk mengetahui

bagaimana kebudayaan (produksi sosial makna dan kesadaran) dapat dijelaskan dalam dirinya sendiri dan dalam hubungannya dengan ekonomi (produksi) dan politik (relasi sosial).

Studi Kultural Di Indonesia

Studi kultural yang lahir di lingkungan kebudayaan, dengan sendirinya akan berdampingan dengan lingkungan pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah bagian dari kebudayaan, lebih tepatnya aspek kebudayaan. Dan kebudayaan Indonesia selalu berjalan dinamis ditengah-tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan Indonesia harus menjadi agen perubahan itu sendiri, sehingga pendidikan tidak mungkin terlepas dari kebudayaan. Bukankah kualitas masyarakat ditentukan oleh identitas kultural masyarakat itu sendiri?

Lebih jauh, studi kultural melihat jauh kedalam proses perubahan kebudayaan dalam struktur kekuasaan yang mengatur hubungan antarmanusia, manusia dan lembaga-lembaga sosial, perubahan, dan pergeseran kebudayaan dari pusat ke kebudayaan pinggiran yang memunculkan pandangan-pandangan baru tentang kebudayaan yang berbeda dengan pandangan tradisional. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia – yang selalu terbentur dengan “benteng” kebudayaan dan pandangan masyarakat yang multikultural – mampu memosisikan pendidikan itu sendiri ditengah-tengah tradisi tanpa harus bersifat tradisional.

Di Indonesia studi kultural belum dikaji secara ilmiah seperti halnya di negara-negara lain. Ada dua tokoh pelopor dan peletak dasar studi kultural di Indonesia dilihat dari hasil-pemikiran-pemikiran mereka yang sangat relevan dalam pengembangan kebudayaan Indonesia. Kedua tokoh itu adalah Ki Hajar Dewantara dan Dr. Soedjatmoko. Kedua tokoh pemikir sosial ini sangat erat pengembangan konsepnya tentang tiga masalah kebudayaan dalam lingkungan studi kultural, yaitu:

1. Kebudayaan merupakan suatu pengertian yang sangat luas dan melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia Indonesia
2. Kebudayaan merupakan kapital budaya dalam perjuangan hidup bangsa dan masyarakat Indonesia
3. Terdapat hubungan yang erat antara kebudayaan dan nasionalisme Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara (1889-1959)

Ki Hajar Dewantara merupakan bapak dan peletak dasar dari studi kultural di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pidato Presiden Universitas Gadjah Mada pada waktu pemberian gelar doctor honoris causa (Dr.H.C) di dalam bidang kebudayaan kepada Ki Hajar Dewantara pada tanggal 7 November 1956. Dalam pidato pada sidang terbuka Senat Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Sardjito mengemukakan bahwa di dalam sosok Ki Hajar Dewantara terdapat tiga lapangan pekerjaan yaitu:

- 1) perjuangan kemerdekaan nasional,
- 2) perjuangan pendidikan
- 3) perjuangan kebudayaan.

Tugasnya sebagai pejuang kemerdekaan nasional dapat dilihat dalam perjuangannya di bidang politik dalam partai politik *Indische Partij*. Ketika beliau pulang ke tanah air setelah di buang ke negara Belanda ki Hajar Dewantara melanjutkan perjuangan kemerdekaannya tetapi tidak melalui politik tetapi melalui upaya pendidikan. Keputusan yang diambil oleh Ki Hajar dewantara ini sulit di terima oleh orang-orang pada zaman itu. Namun demikian upaya pembangunan di bidang pendidikan ternyata mempunyai dasar yang mencakup visi jauh ke depan, seperti yang kita lihat di dalam perkembangan studi kultural. Ternyata Ki Hjar Dewantara telah menyatukan antara bidang perjuangan politik dengan bidang pendidikan. Perjuangan dalam bidang kebudayaan memang merupakan hal yang sangat baru pada zaman tersebut. Bahkan pendidikan di dasarkan pada kebudayaan. Sebenarnya konsep ini sudah dikembangkan pada masa Boedi Oetomo. Ki Hajar dewantara menyatakan bahwa cita-cita dokter Wahidin Sudirohusodo yang disebut aliran kulturil, walaupun organisasi teknik pendidikan dan pengajaran tetap tidak berubah. tahun 1920 muncullah cita-cita baru yaitu penggabungan antara kesadaran kulturil dan kebangkitan politik. Akhirnya konsep ini tertuang dalam dasar-dasar taman siswa 1922.

Ki H.G Soedijono mengembangkankonsep kebudayaan Ki Hajar Dewantara dari perspektif modern. Ada empat prinsip kebudayaan Ki Hadjar Dewantara:

- a. Adat sebagai fenomena kebudayaan. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskannya dalam majalah *Wisata* tahun 1933, bahwa adat merupakan dasar dari setiap kebudayaan. Walaupun demikian, bukan berarti Ki Hajar dewantara mempertahankan adat lama tanpa melakukan perubahan-perubahan. Dalam hal ini Ki hajar dewantara menggunakan istilah masyarakat terbuka di dalam menerima pengaruh luar dengan jaminan tidak akan mengganggu gerakan kebangsaan. Maksudnya, pengakuan terhadap adat bukan berarti menolak setiap adat baru yang berguna bagi perkembangan masyarakat Indonesia
- b. Kebangkitan kesadaran berbudaya, dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan munculnya perguruan nasional Tamansiswa pada tahun 1922 yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Konsep dasar taman siswa adalah menyadarkan bangsa Indonesia akan nilai kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa.
- c. Arti kebudayaan. Dalam majalah *pusara* yang terbit pada tahun 1941 Ki Hajar Dewantara telah mengupas panjang lebar tentang kebudayaan sebagai buah budi manusia yang menunjukkan corak-corak khusus dari budi manusia yang menimbulkan nya. kebudayaan di bentuk dari unsur bakat, kodrat alam dan hidup bersama yang digunakan untuk

meningkatkan taraf kehidupan. Yang terpenting dalam kebudayaan, di samping unsur bakat dan kodrat alam adalah unsur hidup bersama. Dalam kehidupan bersama inilah lahirnya apa yang disebut kultur yang bukan hanya berarti buah budi manusia juga implisit mengandung arti memelihara.

d. Percampuran kebudayaan menurut Ki Hadjar Dewantara di sini adalah:

1. Kehidupan manusia tidak terlepas dari kehidupan makhluk pada umumnya
2. Kebudayaan dapat kawin dengan kebudayaan lain secara asosiasi dan asimilasi
3. kebudayaan hidup menurut hukum seleksi
4. Kebudayaan dipengaruhi oleh alam sekeliling, yaitu kodrat dan masyarakat
5. Dalam kebudayaan ada hukum hidup
6. Kebudayaan suatu bangsa berdasarkan kepada kemanusiaan
7. Disamping kodrat yang membentuk zamandan masyarakat, maka manusia harus berusaha untuk memajukan kebudayaan tersebut

Dalam perkembangannya terjadi dua polemik kebudayaan, yaitu:

- a. Soetomo dan Ki Hajar Dewantara: beranggapan bahwa kebudayaan nasional harus berakar pada kebudayaan masa lalu, yaitu kebudayaan suku-suku bangsa di daerah
- b. Cipto Mangunkusumo dan Sutan Takdir Alisyahbana: mengungkapkan bahwa kebudayaan nasional sebaiknya pada ciptaan baru yang berorientasi pada kebudayaan Barat

Gembel Soedijono menganalisis konsep kebudayaan Ki Hajar Dewantara dengan menempatkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada zamannya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan seperti berikut ini:

1. Indonesia sedang mengalami penjajahan dan keterikatan kepada feodalisme. Keadaan ini memberikan warna dalam perjuangan Ki Hajar Dewantara terutama di dalam perjuangan melalui partai politik.
2. Akibatnya bangsa Indonesia mengalami alienasi, di bidang politik alienasi akibat kolonialisme, ekonomi dan alienasi dalam bidang sosial dan budaya
3. Manusia yang utuh adalah manusia yang berbudaya. Oleh karena itu pemahaman kebudayaan berarti pemahaman manusia itu sendiri.
4. Untuk mengubah yang *nature* menjadi manusia *culture* perlu ada pendidikan

Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik tetapi juga harus berarti kesanggupan dan kemampuan untuk mewujudkan kemerdekaan kebudayaan bangsa, yaitu sifat-sifat yang menjadi ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia.

Uraian tentang Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor akhirnya di tutup dengan sinopsis lintasan sejarah tinjauan taman siswa yang mengatakan bahwa taman siswa menentang pemerintahan kolonial melalui pendidikan nasional dengan sikap non-kooperatif.

Dr. Soedjatmoko (1922-1989)

Soedjatmoko merupakan pemikir dalam bidang kebudayaan, filsafat, moral, politik, pembangunan, dan pendidikan. Kendati demikian suatu hal yang menjadi ciri khas Soedjatmoko adalah sifat kecintaannya terhadap tanah air Indonesia. Buah pikirannya yang mengglobal mempunyai mempunyai satu titik tolak yaitu berdasarkan kebudayaan dari masyarakat yang memiliki kebudayaan itu adalah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Kebudayaan menurut Soedjadmoko berarti kita membicarakan tentang tujuan hidup dari suatu masyarakat sebagai keseluruhan. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan terdapat dua pokok masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, yaitu:

- a. Masalah persatuan nasional, faktor pengikatnya warisan kebudayaan nasional yang tunggal
- b. Masalah modernisasi

Ada tiga Peran yg menentukan gerak masyarakat ke arah modern

- a. Peran pendidikan dan sistem pendidikan, dalam hal ini Soedjatmoko melihat peranan pendidikan humaniora, yang berfungsi untuk mengembangkan empati dan toleransi
- b. Peran pembangunan yang dilaksanakan, karena pembangunan seharusnya merupakan suatu proses belajar atau proses empowerment
- c. Keterbukaan Indonesia dari Kebudayaan Asing

Dalam proses modernisasi, Soedjadmoko memberikan perhatian khusus terhadap peranan universitas, baik pusat maupun daerah. Tetppi masih banyak halangan yang membatasi peranan tersebut karena keterbatasan pengembangan universitas di pusat dan daerah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan rakyat banyak. berkaitan dengan pendidikan Soedjatmko melihat peranan pendidikan humaniora yang dapat berfungsi untuk mengembangkan empati dan toleransi yang sangat diperlukan dalam masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu faktor budaya memegang peranan penting karena dalam kebudayaan terletak nilai-nilai tradisional yang dapat digali.

Berbicara mengenai transformasi sosial yang ditimbulkan akibat modernisasi maka yang harus diperhatikan adalah perubahan sosial yang mempunyai banyak dimensi, yaitu dimensi spritual, dimensi kultural. Dimensi filsafat, dimensi sosial dan dimensi moral dan mungkin pula dimensi agama.

Agama menurut soedjatmoko dapat mempunyai kekuatan positif dalam menggerakkan transfrmasi sosial tetapidapat juga menyebabkan konflik sosial apabila tidak disadari akan

bahayabahaya inklusivisme yang menggunakan lambang-lambang agama untuk kepentingan masyarakat yang eksklusif. Sedangkan transformasi sosial pada negara-negara dunia ketiga perlu diperhatikan mengenai arti dari pembangunan agar tidak terperangkap dalam developmentalisme, yaitu pembangunan untuk tujuan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan seharusnya merupakan suatu proses belajar atau suatu proses *empowerment*, yaitu pembangunan bukan hanya dilakukan tetapi di pelajari. Ada tiga kekurangan yang dihadapi dunia pendidikan.

- a. Proses belajar hanya terbatas kepada hafalan
- b. Kurikulum universitas tidak melihat kepada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat terutama mengenai kemiskinan
- c. Pendidikan tinggi dipersempit oleh pandangan-pandangan yang sempit dari disiplin yang terkotak-kotak

Soedjadmoko bukan hanya seorang cendekiawan di belakang meja, tetapi seorang yang terjun langsung dan ikut merasakan penderitaan-penderitaan masyarakat sebagai masalah sosial dan budaya. Menurut Soedjadmoko politik kebudayaan sangat diperlukan, gejala yang ada adalah orang mendambakan suatu pegangan dalam transformasi sosial yang sedang melanda dunia. Dalam transformasi sosial diperlukan suatu keterarahan agar tidak teralienasi dalam gelombang yang datang bertubi-tubi. Pegangan itu adalah nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan tradisional kita masing-masing. Nilai-nilai itu perlu digali dan disesuaikan dengan tuntutan zaman

Salah satu teman berfikir Soedjadmoko adalah Muchtar Lubis. Muchtar Lubis melihat bahwa kita dalam transformasi budaya haruslah membangun struktur politik, struktur sosial dan struktur ekonomi yang dapat menunjangnya. Struktur yang ada mengalami kebuntuan budaya yang gawat karenanya kita tumbuh menjadi masyarakat kapitalis yang penuh ketidakadilan, kedudukan hukum yang tidak adil merata, kedaulatan rakyat yang tidak berfungsi sepenuhnya dan melemahnya hak asasi manusia seperti yang terlihat pada masa orde baru. Di samping itu situasi budaya yang ditandai dengan ciri-ciri seperti berikut ini:

1. Terdapat kontradiksi antara asumsi dan pretensi moral budaya pancasila dengan kenyataan di dalam masyarakat
2. Sikap hidup yang penuh kemunafikan
3. Lemahnya kreativitas
4. Etos kerja yang lemah
5. Sikap neo-feodalisme
6. Budaya malu yang mulai sirna

Pemikiran Soejadmoko yang visioner serta pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membumi pada kebudayaan Indonesia semuanya relevan pada masanya dan mungkin sampai saat ini.

Pedagogik dalam Studi Kultural

Sebagai suatu bidang ilmu-ilmu sosial, pedagogik mustahil menghindar dari fenomena perubahan global dewasa ini. Pendidikan Indonesia membutuhkan pedagogik yang menempatkan manusia sebagai “manusia” dalam proses pendidikan. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang memiliki pilihan dalam kehidupannya yang rasional, dan memiliki moralitas dalam tatanan kebudayaan, masyarakat lokalnya, masyarakat nasional maupun global. Pedagogik semacam ini, menurut Prof. H.A.R Tilaar, adalah pedagogik libertarian.

Tindakan mutlak yang harus dilakukan dalam proses penemuan pedagogik libertarian – sering juga disebut pedagogik transformatif – dalam dunia pendidikan Indonesia adalah dengan perubahan teknologi, perubahan pribadi, dan perubahan organisasi. Perubahan teknologi, pendidikan Indonesia tidak bisa terlepas dari kemajuan teknologi informasi.

Dalam pemanfaatan teknologi, pendidikan tidak hanya diarahkan kepada kemudahan dan kenyamanan semata. Teknologi hanya sebuah alat komunikasi-informasi, tidak lebih. Peran teknologi dalam pendidikan diharapkan tidak menjadikan manusia Indonesia sebagai “robot” dan “budak” pendidikan.

Perubahan pribadi, adaptasi individu terhadap perubahan global selama ini kebanyakan ditanggapi sebagai sesuatu yang “menyeramkan.” Oleh karena itu, paradigma pendidikan Indonesia di era global semakin mengesankan. Perubahan global tidak harus ditentang, tetapi diatasi dengan pribadi-pribadi yang mendukungnya (Tilaar : 2005, p. 95).

Terakhir adalah perubahan organisasi. Dalam hal ini adalah lembaga pendidikan formal maupun informal. Sebagai suatu *cultural lag*, lembaga pendidikan seperti sekolah harus adaptif terhadap perubahan masyarakat itu sendiri. Bukan sebagai *tedeng aling-aling*, namun sebagai wadah perubahan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Indonesia akan benar-benar hidup dalam tradisi, tanpa bersifat tradisional dan berorientasi global – ditengah kekayaan budaya Indonesia.

Masyarakat Indonesia dengan identitas multikultural-nya, menurut Prof. H.A.R Tilaar, hanya akan memberikan tempat bagi perkembangan individu jika identitas budaya lokal dihormati sebagai tumpuan bagi perkembangan setiap individu. Artinya, multikulturalisme dalam pendidikan nasional sangat relevan dengan desentralisasi pendidikan dan pengembangan demokrasi di Indonesia.

Hubungan antara pedagogik dengan studi kultural menurut Raymond William terletak dalam kesatuan titik tolak yaitu proses perubahan sosial dan adanya keinginan untuk menjadikan

proses belajar sebagai bagian dari proses perubahan sosial. Studi kultural dan pedagogik merupakan ilmu praksis yang mengkaji dan merefleksikan praktik-praktik kebudayaan, keduanya tergolong ilmu performatif. Pandangannya ini berasal dari Sartre yang melihat keberadaan manusia bukan hanya sebagai “berada” tetapi yang mengada” dan sesuatu yang sebenarnya atau belum ada dalam proses mengada (Grossberg, 1992: 201). Masalah pedagogik adalah masalah kebudayaan telah dicatat dalam kongres Pendidikan I di Solo pada tahun 1935. Pendidikan merupakan sarana untuk mencapai cita-cita kemerdekaan

Pedagogik Tradisional dan Studi Kultural

Dalam pedagogik tradisional tidak ada tempat bagi studi kultural. Proses pendidikan terbatas pada proses belajar yang dibatasi di ruang kelas. Proses pendidikan tidak lebih dari proses transmisi dari sebagian kebudayaan, yaitu ilmu pengetahuan yang disampaikan secara tradisional dan secara estafet dari generasi ke generasi. Inilah fungsi reproduksi dari pedagogik tradisional yang pada hakikatnya mempertahankan atau menjadilegitimasi dari struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Pedagogik tradisional tidak mengembangkan manusia kritis dan segala sesuatu diterima secara turun temurun. Oleh karena itu kebudayaan tidak pernah berubah atau menjadi beku tanpa kreativitas. Hak untuk berbeda (*difference*) yang menjadi ciri masyarakat demokrasi tidak hidup dalam pedagogik tradisional. Dalam sejarah pendidikan pedagogik tradisional dikenal sebagai gerakan pendidikan progresif yang bertitik tolak kepada anak (*child centered education*). Perkembangan anak dilihat sebagaimana apa adanya tanpa mendudukkannya dalam relasi dilingkungan masyarakat dalam kebudayaannya.

Studi Kultural dalam Pedagogik Kritis dan Pedagogik Transformatif

Pedagogik kritis dan pedagogik transformatif menentang pandangan mengenai proses pendidikan yang terisolasi dari masyarakat dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Pendidikan tidak dapat terpisah dalam struktur kebudayaan dimana proses pendidikan terjadi. Proses pendidikan bukan semata-mata merupakan proses transmisi kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kebudayaan. Oleh karena itu kebudayaan berkembang sesuai dengan kemampuan kreativitas manusia. Dilihat dari perkembangan sejarah pendidikan pedagogik kritis sudah berkembang secara pesat pada dekade 70-an. Ada tiga masalah yang sangat progresif pada waktu itu yaitu:

1. Mengkritik prinsip *child centered education* dari gerakan progresif
2. Memberikan arti besar terhadap peranan guru untuk menjadikan pendidikan sebagai agen dari perubahan sosial

3. Perubahan ekonomi Amerika menjadi salah satu syarat untuk perbaikan pendidikan dan sebaliknya.

Dari sini muncullah apa yang disebut dengan kekeliruan-kekeliruan dalam pendidikan Amerika, dan ternyata kekeliruan-kekeliruan itu masih relevan dengan pendidikan di Indonesia saat ini.

Kekeliruan-kekeliruan yang Ada Dalam Dunia Pendidikan adalah:

1. Manusia dilahirkan bebas, yang benar manusia lahir tanpa daya. Dia hanya dapat memperoleh kemerdekaan dalam rangka kebudayaannya. Contohnya seorang manusia dilahirkan sebagai orang Amerika atau seorang Cina atau Indonesia, maka manusia itu dilahirkan dengan kemungkinan-kemungkinan dari kelahiran tersebut.
2. Manusia dilahirkan baik, sebenarnya manusia lahir bukannya baik atau jelek, tetapi manusia dilahirkan dengan potensi-potensi yang dapat berkembang ke arah yang berjenis-jenis. Disinilah letak peranan kebudayaan dalam menentukan makna hidup seseorang. Dengan kata lain proses membangun masyarakat merupakan suatu proses pendidikan
3. Anak mempunyai dunianya sendiri. Sejak anak itu lahir dia hidup di dalam suatu jaringan kehidupan yang ditentukan oleh orang-orang dewasa melalui kebudayaan. Oleh karena itu seseorang sejak lahir telah dihadapkan kepada jaringan-jaringan kehidupan dari semua kelompok umur manusia. Masalah konflik antar generasi sebenarnya bukanlah masalah yang dilahirkan.
4. Pendidikan dianggap sesuatu yang menetap dari abad-ke abad, oleh karena itu pendidikan harus dipisahkan dari kehidupan politik dan kekuatan-kekuatan sosial yang hidup, sebenarnya dunia yang terbuka seperti saat ini dimana pengaruh-pengaruh dari luar ikut menentukan perubahan kebudayaan suatu kelompok masyarakat
5. Fungsi sekolah yang sifatnya tidak memihak, sebenarnya sekolah sudah menjadi suatu transfer dari keinginan masyarakat untuk generasi-generasi muda. John Dewey mengungkapkan bahwa sekolah sebenarnya telah berfungsi sebagai lingkungan yang telah memilih anak. Artinya sekolah bukan lembaga yang netral tetapi merupakan pelaksanaan dari sistem kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Sekolah hanyalah merupakan salah satu dari lembaga-lembaga sosial yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak
6. Peranan pendidikan formal masih dominan pada masyarakat Indonesia, sebenarnya pendidikan formal hanyalah salah satu sarana dari proses pendidikan.

Studi kultural menjadi sangat penting bagipara pendidik karena studi kultural tersebut memberikan dasar untuk menyimak masalah-masalah penting seperti pemerataan pendidikan yang kerap kali hanya menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu. Pengetahuan dankeuasaan harusnya direkonseptualisasikan karena sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan.

Masalah Identitas Bangsa

Masalah identitas bangsa merupakan masalah terbesar pada abad ke-21 ini. Hal ini disebabkan adanya dua gelombang besar di dalam perubahan sosial yaitu globalisasi dan demokrasi. Globalisasi yang menjadi pokok permasalahan bukan hanya bagi orang-orang dalam bidang perdagangan, politik, ekonomi, tetapi juga menjadi pokok masalah dalam bidang filsafat dan juga pendidikan.salah satu *kick back* dari arus globalisasi adalah keinginan manusia untuk lepas dari arus yang dapat mengeliminir atau memarginalisasikan identitas suatu masyarakat, suatu suku, bahkan identitas seseorang.kekuatan yang menonjol pada abad 21 alah munculnya identitas suku atau suku bangsa yang terkadang bentrok dengan pengertian negara-bangsa.

Gelombang kedua yang menyebabkan munculnya masalah identitas adalah berkembang suburnya demokrasi. Prose demokrasi ini berjalan dengan mantap pada abad 21. Satu persatu negarra-negra totaliter dan semi totaliter rontok digantikan oleh negara demokrasi. Proses demokratisasi berjalan terus menerus dalam penyempurnaan praktik-praktik demokratis. Negaranegara demokrasi yang relatif lama dan telah berpengalaman masih terus mengalami hambatanhambatan dari praktik-praktik antai demokrasi. Salah satu pokokajaran demokrasi adalah suatu kesempatan untuk berbeda. Inti demokrasi adalah penghormatan kepada hak-hak asasi manusia, hak untuk berbed dan hakuntuk bekerjasama karena keinginan untuk hidup bersama dalam suatu kelompok, baik karena hubungan darah maupun kehidupan bersama dalam satu teritori yang telah berakar secara turun temurun.

Demokrasi dan identitas merupakan dua prinsip yang saling mengisi. Demograsi mempradugakan penghormatan kepada perbedaan-perbedaan, karena identitas yang unik dari anggota-anggotanya. Identitas ini yang kemudian akan membangun suatu masyaakat etnik tertentu. Identitas kelompok kemudian menjelma menjadi kesadaran etnis. Arif Budiman diskursus mengenai kehidupan bernegara terjadi dalam tiga tahap yaitu

1. Lahirnya masyarakat alamiah. Manusia dikuasai oleh egoisme sehingga lama kelamaan manusia akan menjadi sama dengan kehidupan binatang. Sehingga timbul kesepakatan bersama dari seorang yang mempunyai kekuasaan yang dapat mengakomodasikan keinginan-keinginan yang bermacam-macam dari pada anggotanya

2. Lahirnya masyarakat politik, yang berupa masyarakat *leviathan* yang dikepalai oleh seorang diktator. Kemudian lahirlah suatu masyarakat yang menghormati individu-individu dan bersepakat mempunyai suatu pemerintahan bersama dalam suatu kontrak sosial seperti yang dikemukakan Jonh Locke (Schmandt, 2002: 329-355)
3. Lahirnya masyarakat madani dengan ciri-ciri a) inklusivisme, b) egalitarianisme, c) toleransi, d) demokrasi

Menurut Rpbert A. Dahl, salah satu bahasa atau masalah dari masyarakat demokrasi adalah kemungkinan terjadinya konflik budaya (Dahl, 2001: 203), terutama pada masyarakat pluralis, kemungkinan terjadinya konflik antara identitas dari kelompok-kelompok di dalam masyarakat tersebut lebih besar. Untuk mengatasinya diperlukan saling mengerti antar kelompok dan adanya toleransi yang tinggi antar sesama.

Transformasi Sosial

Pada masareformasi masalah mengenai kebudayaan nasional dan bangsa Indonesia akan muncul kembali dalam diskursus ilmu politik, ilmu kebudayaan dan ilmu pendidikan (pedagogik) atau dengan kata lain menjadi topik hangat dalam lingkup studi kebudayaan. Pedagogik yang diinginkan sebagai bagian dari studi kebudayaan tentunya juga mempunyai tanggungjawab mengenai masalah-masalah kebudayaan yang besar. Pedagogik merupakan suatu ilmu praksis untuk mewujudkan suatu bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional haruslah bertumpu pada pluralits budaya dari suku-suku yang ada dalam masyarakat indonesia. Prof. Dr Selo Sumardjan mengungkapkan bahwa Indonesia sering mengalami transformasi sosial. Apabila transformasi tidak bertimpu kepada kebudyaan yang dimiliki maka hasilnya adalah kekacauan dalam kehidupan bersama. Transfoormasi sosial ini merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang ingin maju kepada kehidupan modern. Tetapi dalam upaya transformasi sosial kita harus berpijak pada kebudayaan yang ada, yaitu kebudayaan etnis yang dimiliki oleh suku-suku bangsa di Indonesia.

Tilaar (2003: 51) mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia belum memiliki kebudayaan nasional Indonesia bahkan belum merupakan suatu bangsa Indonesia dalam arti yang sebenarnya. Karena apa yang kita miliki barulah pada tahap memiliki masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada saat ini memamng memerlukan suatu pengembangan identitas etnis dari berbagai jenis suku yang ada di Indonesia yang hak eksistensinya selama orde baru telah diabaikan. Pengembangan budaya etnis perlu dilakukan karena budaya tersebut seperti adat istiadat dan semacamnya merupakan dasar dari trnsformasi sosial.

Proses pembentukan masyarakat etnis dengan kebudayaannya dalam masyarakat Indonesia yang bertekad untuk membentuk satu kebudayaan nasional yaitu kebudayaan bangsa Indonesia tidak dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau terjadi secara mekanis.

Pedagogik dan Pemberdayaan

Pendidikan pada hakekatnya proses untuk menemukan identitas seseorang atau kelompok. Proses pendidikan yang sebenarnya adalah yang membebaskan seseorang dari berbagai kungkungan atau empowering atau menyadarkan kemampuan identitas seseorang atau kelompok. Afinitas pedagogik dan studi kultural adalah membebaskan manusia dari ikatan-ikatan yang terdapat di luar dirinya. Meskipun demikian, pendidikan dapat pula berbentuk sesuatu yang mengikat kebebasan seseorang

Kesimpulan

Pendidikan dan kekuasaan merupakan suatu kajian studi kultural, bagaimana suatu rezim ataupun pemerintah melestarikan kebudayaan melalui lembaga pendidikan. Apabila suatu sistem kekuasaan memaksakan kehendaknya dan merampas kemerdekaan individu beserta kebudayaan maka pendidikan telah berubah menjadi alat *oppressive* bagi perkembangan individu atau kelompok masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dahl.A. Robert, *Perihal Demokrasi* (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Grossberg, Lawrence,; Cary Nelson; Paula Treicher (ed), *Cultural Studies*, Routledge, New York, 1992
- Lubis, Mochtar, *Manusia Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Rosyada, Dede, 2004, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Jakarta: Prenada Media
- Sardar, Ziauddin, *Thomas Khun dan Perang Ilmu* (terjemahan) Jendela, Yogyakarta, 2002
- Sularto, St (ed), *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi* penerbit Kompas, Jakarta, 2001
- Tilaar, H.A.R, 2005, *Manifesto Pendidikan Nasional*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Tilaar, H.A.R, 2003, *Kekuasaan & Pendidikan*, Magelang, Indonesiatara
- Wizan, Adnan M, *Akar Gerakan Orientalisme, dari Perang fisik menuju Perang Pikir* (terjemahan),

Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2003

<http://Kunci.or.id/esai/nws/01/kajian-budaya.htm>